

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG
ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG PADANG DENGAN
PENGGUNA LAYANAN POS**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

FITRI OKTALISA

1710012111039

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG**

2021

No. Reg : 384/Pdt/02/III-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

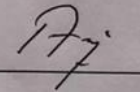
No. Reg : 384/Pdt/02/III-2021

Nama : Fitri Oktalisa
NPM : 1710012111039
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman
Barang Antara PT. Pos Indonesia cabang
Padang Dengan Pengguna Layanan Pos

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

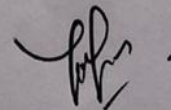
As Suhaiti Arief, S.H., M.H

(Pembimbing)



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG PADANG DENGAN PENGGUNA LAYANAN POS

Fitri Oktalisa¹, As Suhaiti Arief¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: fitrioktalisa02@gmail.com

ABSTRACT

Implementing goods delivery agreement between PT. Pos Indonesia Padang branch with postal service users found default. The problem this research is regarding form of default in the delivery agreement and regarding the form of compensation given. This research is a sociological juridical, the data sources are primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study. The data were analyzed qualitatively. The results of the study show the form of default in the form of damage, loss and late delivery of goods. The form of compensation for default is 5 times the shipping cost for damaged goods, 10 times the shipping cost for lost goods and 25% shipping cost for late delivery of goods.

KEY WORD: *Default, Delivery of Goods, PT. Indonesian post*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini membawa perubahan teknologi ke arah yang semakin canggih. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia ingin segala sesuatu dapat dilakukan dengan praktis. Di era globalisasi, kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh teknologi ditambah lagi dengan maraknya penggunaan di bidang kegiatan jual beli dan transaksi elektronik. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat memerlukan perantara sebagai bentuk perpanjangan tangan antara produsen dengan konsumen. Salah satunya yaitu PT. Pos Indonesia (Persero).

Dalam melaksanakan layanan pengiriman surat dan barang PT. Pos Indonesia cabang Padang pastinya berhubungan pengguna layanan pos. Sebelum dilakukan pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang terdapat suatu perjanjian antara pengguna layanan pos dengan PT. Pos Indonesia cabang Padang sebagaimana yang tertuang dalam resi pengiriman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG PADANG DENGAN PENGGUNA LAYANAN POS.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos?
2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi atas wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang melihat kenyataan hukum di tengah masyarakat¹.

¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan wawancara dengan responden yaitu petugas pos dan pengguna layanan pos.

b. Data sekunder diperoleh berdasarkan bahan kepustakaan, terdiri dari :

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal
3. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT.Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan Pos

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi wanprestasi.

Pasal 1313 KUHperdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”

Bentuk-bentuk wanprestasi pada pengiriman barang pada PT .Pos Indonesia cabang Padang berupa:

1. Tidak terlaksananya pengiriman barang sama sekali, karena terjadi kehilangan pada barang kiriman.
2. Pengiriman barang dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya karena barang kiriman mengalami kerusakan.
3. Adanya keterlambatan dalam pengiriman barang.

B. Bentuk ganti rugi atas wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan Pos

Bentuk pembayaran ganti rugi atas wanprestasi pada PT. Pos Indonesia cabang Padang ada yang ditanggung asuransi dan ada yang tidak ditanggung asuransi, tergantung jenis layanan yang digunakan saat melakukan pengiriman.

Untuk pengiriman barang yang menggunakan asuransi pastinya biaya pengiriman bertambah dari biaya sebelumnya yang dihitung berdasarkan harga tanggung nilai barang (HTNB) sebesar 0,24% dari nilai barang. Sifat dari penggunaan asuransi sendiri tidak wajib atau tergantung kesepakatan pengguna layanan pos.²

Bentuk ganti rugi sejumlah uang atas wanprestasi pada barang kiriman yang tidak menggunakan asuransi yaitu:

- a) Kerusakan pada barang kiriman diganti dengan 5 kali ongkos kirim, maksimalnya Rp. 1.000,000
- b) Kehilangan barang kiriman diganti dengan 10 kali ongkos kirim, maksimalnya Rp. 1.000,000
- c) Keterlambatan pengiriman barang ke alamat tujuan diganti dengan 25 % ongkos kirim, maksimalnya Rp. 1.000,000.

² (Anonim, 2017, *syarat dan ketentuan layanan*, www.posindonesia.co.id/id/ /content4).

Pengguna layanan pos dapat melakukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi suatu wanprestasi dengan alur prosedur sebagai berikut ;

- a. Mengajukan keluhan kepada *customer service*;
- b. Membawa KTP sebagai bukti identitas diri;
- c. melakukan pelacakan status pengiriman;
- d. Pemeriksaan oleh *manager* atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos. Melakukan pengisian formulir pengaduan berupa:
 1. Mengisi data identitas diri
 2. Mengisi alamat lengkap kantor pos kirim dan kantor pos terima;
 3. Jenis barang kiriman;
 4. Melampirkan bukti resi pengiriman;

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri atas kerusakan, kehilangan dan keterlambatan pengiriman barang.

Bentuk ganti rugi atas wanprestasi PT.Pos Indonesia cabang Padang memberikan ganti rugi berupa 5 kali ongkos kirim untuk kerusakan barang, 10 kali ongkos kirim untuk kehilangan barang dan 25% ongkos kirim untuk keterlambatan pengiriman barang

PT. Pos Indonesia cabang Padang harus terus meningkatkan layanan yang baik dan memuaskan serta melakukan perbaikan sistem kerja berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan pos. Selain itu, seharusnya ganti rugi tidak hanya diberikan berdasarkan ongkos kirim tetapi juga ganti rugi senilai harga barang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H.,M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Uning Pratimaratri, S.H., M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H.
3. Ibu Yansalzisatry, S.H.,M.H selaku penguji satu dan Ibu Elyana Novira, S.H.,M.H selaku penguji dua
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H selaku Ketua bagian Hukum Perdata.
5. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus sebagai *Uploader Executive summary*
6. Bapak/Ibu dosen fakultas hukum Universitas Bung Hatta

Terutama terimakasih kepada kedua orang tua penulis, serta kakak dan nenek yang selalu menyemangati baik dari segi materil dan immateril semoga kelak ananda menjadi pribadi yang bermanfaat, amin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sumber Lain

Anonim, 2017, *syarat dan ketentuan layanan*, www.posindonesia.co.id/id/ /content4

